

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Sartono (2012) mengatakan teori keagenan ini menjelaskan sebuah hubungan kontrak antara prinsipal dan agen. Dalam *agency theory* ini prinsipal disebut sebagai pemegang saham dan agen disebut sebagai manajer atau pihak yang mengelola perusahaan. Dalam teori keagenan, kepentingan manajer dan kepentingan pemegang saham seringkali bertentangan sehingga dapat terjadi konflik diantaranya. Menurut Meisser *et al.* (Ishaq, 2015) hubungan keagenan ini mengakibatkan dua permasalahan yaitu terjadinya informasi asimetris dan terjadinya konflik kepentingan. Menurut Dewi (Anisah, 2014) untuk mengawasi dan menghalangi perilaku oportunities manajer maka pemegang saham harus bersedia mengeluarkan *cost* pengawasan yang disebut biaya keagenan. Biaya keagenan meliputi pengeluaran untuk memonitor kegiatan, pengeluaran untuk membuat struktur organisasi yang meminimalkan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan (Ishaq, 2015).

Kepemilikan manajerial diharapkan dapat membantu menyatukan antara pihak manajer dan pemegang saham karena dengan adanya kepemilikan manajerial, kepentingan manajemen dengan pemegang saham dapat disejajarkan. Namun di sisi lain manajer mempunyai keinginan kuat atau kepentingan sendiri yaitu untuk memperkaya dirinya bukan untuk memperkaya pemegang saham perusahaan. Hal inilah yang membuat terjadinya konflik antara pihak manajer dan pemegang saham karena adanya perbedaan tujuan, sehingga konflik ini dapat dikaitkan dengan agensi teori.

2.1.2 Teori Sinyal

Teori sinyal pertama kali dimunculkan oleh Spence di dalam penelitiannya yang berjudul *Job Market Signalling*. Nor Hadi (2011) mengatakan isyarat atau *signal* memberikan suatu sinyal, pihak pengirim (pemilik informasi) berusaha memberikan informasi relevan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak penerima. Kemudian pihak penerima akan menentukan perilakunya sesuai dengan pemahamannya terhadap sinyal tersebut.

Teori sinyal menjelaskan mengapa perusahaan harus untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. membuat perusahaan memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang daripada pihak luar (investor dan kreditor).

Teori sinyal mengembangkan model dimana struktur modal (penggunaan utang) merupakan sinyal yang disampaikan oleh manajer ke pasar. Jika manajer mempunyai keyakinan bahwa prospek perusahaan baik dan karenanya ingin agar saham tersebut meningkat, maka manajer akan mengkomunikasikan hal tersebut kepada investor. Manajer dapat menggunakan utang tersebut sebagai sinyal yang lebih kredibel. Karena perusahaan dalam meningkatkan utang bisa dipandang sebagai perusahaan yang yakin dengan prospek perusahaan di masa mendatang. Investor juga diharapkan akan menangkap sinyal tersebut dengan pemahaman bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik.

2.2 Profitabilitas

Profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba pada satu periode tertentu menurut Kasmir (2014). Profitabilitas menunjukkan kinerja suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan sehingga dapat berpengaruh pada pembuatan keputusan investasi. Artinya, semakin baik kinerja keuangan yang dimiliki perusahaan, maka akan memiliki kepercayaan yang tinggi untuk mengungkapkan tanggung jawab sosialnya. Menurut Widiyanto (2011) tingkat profitabilitas yang tinggi pada

perusahaan akan meningkatkan daya saing antar perusahaan. Berikut ini adalah beberapa jenis pengukuran yang terdapat dalam profitabilitas :

1. Gross Profit Margin

Gross Profit Margin digunakan dalam mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari persentase laba kotor dari penjualan.

$$GPM = \frac{\text{Penjualan} - \text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Penjualan}}$$

2. Net Profit Margin

Net Profit Margin digunakan untuk melihat laba bersih dari penjualan sesudah di kurangi oleh pajak.

$$NPM = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Penjualan}}$$

3. Operating Profit Margin

laba operasi adalah pengukuran persentase sisa penjualan setelah semua biaya dan pengeluaran lain dikurangi kecuali bunga dan pajak.

$$OPM = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

1. Return on Assets (ROA)

Rasio ini mengukur perusahaan atas keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktifitas yang digunakan untuk aktifitas operasi perusahaan dengan tujuan menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya (Robert, 2012).

Rumus untuk menghitung ROA (Houston, 2011):

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

2. Return on Equity (ROE)

Return on equity (ROE) adalah rasio ini melihat tingkat pengembalian ekuitas dari aktifitas investasi dan penjualan yang dilakukan (Freddy Rangkuti, 2012).

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Jumlah Ekuitas}}$$

3. Return On Investment (ROI)

Return on investment menunjukkan kemampuan perusahaan secara keseluruhan untuk menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di perusahaan (Syamsuddin, 2013)

$$ROI = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

4. Earning per share (EPS)

Earning per share merupakan rasio perbandingan yang melihat kemampuan setiap lembar saham dalam menghasilkan laba (Syafri, 2015)

$$EPS = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak} - \text{Dividen Saham Preferen}}{\text{Jumlah Saham Biasa yang Beredar}}$$

Profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan *Return on Equity (ROE)* karena rasio ROE dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan modal sendiri. Semakin tinggi nilai ROE, maka semakin baik. Itu mengindikasikan bahwa posisi perusahaan akan terlihat semakin kuat. Berkaitan dengan penelitian ini juga dalam pengungkapan *corporate governance* dan *corporate social responsibility* profitabilitas digambar sebagai indikator kesuksesan perusahaan dalam manajemen keuangan perusahaan. Adapun menurut Kasmir (2014) tujuan dari pengukuran profitabilitas bagi perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Menghitung laba yang didapat perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Menilai perkembangan laba dari periode dahulu ke periode sekarang.
4. Menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengukur produktivitas perusahaan yang digunakan untuk modal pinjaman atau modal sendiri.
6. Mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

Sedangkan manfaat yang dari pengukuran rasio profitabilitas adalah:

1. Mengetahui besarnya profitabilitas yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

2.3 Good Corporate Governance

Good Corporate Governance merupakan peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern (Nugroho, 2014). Akibat yang muncul dari hal tersebut akhirnya membuat tata kelola perusahaan harus mempertimbangkan masalah seperti *Corporate Social Responsibility* (CSR). Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas *good corporate governance* diterapkan pada setiap aspek bisnis dan disemua jajaran perusahaan. Terdapat 5 asas *good corporate governance*, yaitu:

1. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus mempunyai sifat keterbukaan dalam memberikan sebuah informasi. Dengan begitu dapat mengurangi asimetri informasi yang ada.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai perusahaan.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi (*Independency*)

Dalam pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus bersifat independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi atau saling menguasai dan tidak dapat ditekan oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairnes*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Secara umum GCG memiliki struktur organisasi yang memiliki peranan masing-masing didalam sesuai jabatan serta kinerjanya berikut struktur organisasi GCG dalam perusahaan:

1. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organisasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Bank dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Bank yang berlaku. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) juga sebagai forum dimana Direksi dan Komisaris melaporkan dan bertanggung jawab atas kinerja mereka lakukan kepada Pemegang Saham.

2. Dewan Komisaris

Jumlah anggota dewan Komisaris paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Paling kurang 1 (satu) orang anggota dewan Komisaris wajib tinggal di Indonesia. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen dan paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

3. Dewan Direksi

Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali. Penilaian independensi didasarkan terkaitan yang bersangkutan pada kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keuangan, serta hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham, memerlukan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi. Mayoritas anggota Direksi paling kurang memiliki pengalaman lima tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif.

4. Komite Audit

Komite audit adalah sebagai komite yang ditunjuk oleh perusahaan sebagai penghubung antara dewan direksi dan auditor eksternal. Komite audit harus

independen dari manajemen agar mampu melakukan pemantauan yang efektif, sehingga dapat menekan perilaku kecurangan pada perusahaan.

5. Manajer

Peran manajer di dalam operasional sangatlah penting bagi perusahaan. Oleh sebab itu seorang manajer harus memiliki pengetahuan yang luas tentang hal teknis yang terkait dengan perusahaan.

6. Auditor Eksternal (Independent)

Tanggung jawab Auditor Eksternal adalah memberikan opini atas laporan keuangan perusahaan. Laporan Auditor Eksternal merupakan opini profesional tentang laporan keuangan perusahaan.

7. Auditor Internal

Tugas dari Auditor Internal adalah memberikan rekomendasi atau konsultasi kepada pihak-pihak berwenang di dalam perusahaan tentang situasi yang terjadi didalam perusahaan.

Adapun manfaat dari Good Corporate Governance merupakan acuan bagi perusahaan untuk melaksanakan GCG dalam rangka:

1. Meningkatkan kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.
2. Meningkatkan pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan.
3. Meningkatkan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.

5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

2.3.1 Pengungkapan *Corporate Governance*

Informasi yang diungkapkan pada laporan tahunan tidak hanya berupa informasi keuangan saja, tetapi juga laporan non keuangan. Selain digunakan dasar pengambilan keputusan, pengungkapan dalam laporan tahunan juga digunakan sebagai bentuk pertanggung jawaban dan akuntabilitas manajemen atas kinerja pengelolaan perusahaan kepada para investor sebagai pemilik (Warsono, 2012). Sementara itu, kata *disclosure* atau pengungkapan memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Apabila dikaitkan dengan data, *disclosure* berarti memberikan data yang bermanfaat kepada pihak yang memerlukan. Data di sini dapat berupa informasi keuangan dan informasi non-keuangan perusahaan yang relevan dalam pengambilan keputusan (Ghozali, 2016). Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pengungkapan laporan keuangan, penyajian laporan tambahan juga diperlukan untuk membuat keputusan yang wajar dan relevan, termasuk informasi tentang CG demi melindungi kepentingan *stakeholders*. Dari perspektif teori keagenan (*agency theory*), asimetri informasi merupakan keadaan dimana perusahaan mengetahui pengetahuan lebih luas tentang aktivitas dan kondisi keuangan perusahaan dibandingkan dengan investor yang sudah ada maupun investor potensial. Demi kepentingan ini, maka *corporate governance perception index* (CGPI, 2014) mengeluarkan pedoman *Good Corporate Governance* Indonesia yang mengatur tentang standar-standar pengungkapan *corporate governance* yang sebaiknya diungkapkan oleh perusahaan. Adapun indikator pengungkapan *corporate governance perception index* yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 38

indikator yang berisikan 5 aspek menurut *corporate governance perception index*, 2014. Berikut ini adalah daftar indikator CGPI pada tabel 2.3.1

Tabel 2.3.1 Daftar Indikator CGPI

no	item point	item pengungkapan	Point
1	Shareholder Rights (subindex A)	A.1. Perusahaan menggunakan suara kumulatif untuk pemilihan direksi. Suara kumulatif adalah aturan standar di bawah Komersial Kode, tetapi perusahaan dapat memilih keluar dengan suara mayoritas pemegang saham.	1
		A.2. Perusahaan mengadakan ijin pemungutan suara melalui email	1
		A.3. Perusahaan memilih tanggal pertemuan dengan pemegang saham agar tidak tumpang tindih dengan perusahaan lain dalam industri yang sama, atau memilih lokasi pertemuan untuk mendorong kehadiran	1
		A.4. Perusahaan mengungkapkan calon direktur kepada pemegang saham di muka pertemuan pemegang saham.	1
		A.5. Persetujuan Dewan diperlukan untuk transaksi dengan pihak terkait.	1
2	Boards of Directors (subindex B)	B.1. Dewan Komisaris rata-rata menghadiri setidaknya 75% dari pertemuan	1
		B.2. Posisi Dewan Komisaris atas rapat tercatat dalam notulen rapat	1
		B.3. Direktur Utama/CEO dan komisaris utama adalah orang yang berbeda	1
		B.4. Ada sistem yang mengevaluasi anggota Dewan Komisaris	1
		B.5. Ada peraturan yang mengatur pertemuan Dewan Komisaris	1
		B.6. Perusahaan menggelar empat atau lebih rapat Dewan Komisaris per tahun	1
3	Outside Directors (subindex C)	C.1. Perusahaan mempunyai setidaknya 30% Komisaris Independen	1
		C.2. Perusahaan mempunyai lebih dari 30% Komisaris Independen	1

		C.3. Perusahaan memiliki satu atau lebih Komisaris dari luar negeri	1
		C.4. Perusahaan memiliki Komisaris Independen	1
		C.5. Komisaris Independen tidak menerima dana pensiun	1
		C.6. Komisaris Independen dapat memperoleh saran para ahli dari luar perusahaan	1
		C.7. Perusahaan mempunyai sistem untuk mengevaluasi Komisaris Independen atau rencana untuk memiliki satu	1
		C.8. Pemegang saham menyetujui membayar agregat Komisaris Independen di pertemuan pemegang saham	1
		C.9. Komisaris independen rata-rata menghadiri setidaknya 75% dari pertemuan	1
		C.10. Perusahaan mempunyai kode etik bagi Komisaris Independen	1
		C.11. Perusahaan menetapkan contact person untuk mendukung Komisaris Independen	1
		C.12. Ada pertemuan khusus untuk Komisaris Independen	1
		C.13. Perusahaan tidak mengizinkan Komisaris Independen untuk membeli saham perusahaan	1
4	Audit Committee and Internal Auditor (subindex D)	D.1. Ada Komisaris Independen didalam Komite Audit	1
		D.2. Rasio Komisaris Independen dalam Komite Audit: 1 jika rasio lebih dari 2/3 (minimum hukum bagi perusahaan yang harus memiliki komite audit), 0 sebaliknya.	1
		D.3. Ada peraturan yang mengatur Komite Audit / Auditor Internal	1
		D.4. Komite Audit meliputi seseorang dengan keahlian dalam akuntansi	1
		D.5. Komite Audit / Audit Internal merekomendasikan auditor eksternal pada pertemuan pemegang saham tahunan	1
		D.6. Komite Audit / Audit Internal menyetujui penunjukan kepala audit internal	1
		D.7. Notulen rapat menulis setiap pertemuan Komite Audit / Audit Internal	1
		D.8. Ada laporan kegiatan Komite Audit / Audit Internal di pertemuan tahunan pemegang saham	1

		D.9. Anggota Komite Audit rata-rata menghadiri setidaknya 75% dari pertemuan	1
		D.10. Komite Audit / Audit Internal bertemu dengan Auditor Eksternal untuk meninjau laporan keuangan	1
		D.11. Komite Audit bertemu dua kali atau lebih per tahun	1
5	Disclosure to Investors (subindex E)	E.1. Perusahaan melakukan kegiatan investor relations	1
		E.2. Website perusahaan termasuk resume dari anggota dewan.	1
		E.3. Ada pengungkapan bahasa Inggris.	1
Skor yang harus diungkapkan oleh perusahaan			38

Sumber: *corporate governance perception index*, 2014

2.4 Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen usaha untuk bertindak etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk meningkatkan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat yang lebih luas (Marnelly, 2013). Dalam melaksanakan *corporate social responsibility* merupakan hal yang sangat penting karena dapat membentuk citra baik perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan seharusnya melihat *corporate social responsibility* bukan sebagai pusat biaya (*cost center*) tetapi sebagai pusat laba di masa mendatang. CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan dalam memperbaiki kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas operasional perusahaan. Semakin banyak bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan perusahaan terhadap lingkungannya, *image* perusahaan menjadi meningkat (Retno, 2012). Tanggung jawab sosial perusahaan memberikan keuntungan bersama lagi semua pihak, baik perusahaan sendiri, karyawan, masyarakat, pemerintah maupun lingkungan. Menurut (Rahayu, 2014) ada lima manfaat CSR terhadap perusahaan:

1. Meningkatkan citra perusahaan.
2. Mengembangkan kerja sama dengan perusahaan lain.
3. Memperkuat brand merk perusahaan dimata masyarakat.
4. Membedakan perusahaan tersebut dengan para pesaingnya.

5. Memberikan inovasi bagi perusahaan.

Perusahaan yang telah melaksanakan *corporate governance* dengan baik sudah seharusnya melaksanakan aktivitas CSR sebagai wujud kepedulian perusahaan pada lingkungan sosial (Ni Wayan, 2012).

2.4.1 Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Masyarakat saat ini telah membutuhkan informasi mengenai sejauh mana perusahaan sudah melakukan aktivitas sosialnya sehingga hak masyarakat untuk hidup aman dan tentram, kesejahteraan karyawan, dan keamanan mengkonsumsi makanan dapat terpenuhi. Dalam perkembangan sekarang ini akuntansi konvensional telah banyak dikritik karena tidak dapat mengakomodir kepentingan masyarakat secara luas, sehingga kemudian muncul konsep akuntansi baru yang disebut sebagai *Social Responsibility Accounting (SRA)* atau Akuntansi Pertanggung jawaban Sosial. Membuat perusahaan semakin sadar bahwa keberlangsungan hidup perusahaan tergantung dari hubungan perusahaan dengan lingkungan tempat perusahaan beroperasi. Keberlangsungan hidup perusahaan akan terjamin jika perusahaan tidak hanya mementingkan aspek keuangan saja, namun memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Pengungkapan *corporate social responsibility* digunakan dalam sejumlah informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian secara optimal pasar modal yang efisien. Pengungkapan ada yang bersifat wajib (*mandatory*) yaitu pengungkapan informasi wajib dilakukan oleh perusahaan yang didasarkan pada peraturan atau standar tertentu, namun ada juga yang masih bersifat sukarela (*voluntary*) dalam pengungkapan informasi melebihi persyaratan minimum dari peraturan yang berlaku. Menurut Mathews (2015) pengungkapan *corporate social responsibility* dapat didefinisikan sebagai penyediaan informasi finansial dan nonfinansial yang berkaitan dengan interaksi antara organisasi dengan lingkungan sosial dan fisik organisasi tersebut, yang dicantumkan dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan sosial yang terpisah. Adapun indikator pengungkapan CSR yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 91 indikator

yang berisikan 45 aspek menurut Global Reporting Initiatives (G4) pada tabel 2.4.1 daftar indikator pengungkapan CSR.

Tabel 2.4.1 Daftar Indikator Pengungkapan CSR

NO	INDIKATOR	Point
KATEGORI: EKONOMI		
Aspek : Kinerja Ekonomi		
1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan	1
2	Implikasi finansial dan risiko serta peluang lainnya kepada kegiatan organisasi karena perubahan iklim	1
3	Cakupan kewajiban organisasi atas program imbalan pasti	1
4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah	1
Aspek : Keberadaan Pasar		
5	Rasio upah standar pegawai pemula (entry level) menurut gender dibandingkan dengan upah minimum regional di lokasi-lokasi operasional yang signifikan	1
6	Perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat lokal di lokasi operasi yang signifikan	1
Aspek : Dampak Ekonomi Tidak Langsung		
7	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan	1
8	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besarnya dampak	1
Aspek : Praktik Pengadaan		
9	Perbandingan pembelian dari pemasok lokal di lokasi operasional yang signifikan	1
KATEGORI : LINGKUNGAN		
Aspek : Bahan		
10	Bahan yang digunakan berdasarkan bobot atau volume	1
11	Persentase bahan yang digunakan yang merupakan bahan input daur ulang	1
12	Konsumsi energi dalam organisasi	1
13	Konsumsi energi di luar organisasi	1
14	Intensitas energy	1
15	Pengurangan konsumsi energy	1
16	Pengurangan kebutuhan energi pada produk dan jasa	1
Aspek : Air		
17	Total pengambilan air berdasarkan sumber	1
18	Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan	1

	air	
19	Persentase dan total volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali	1
Aspek : Keanekaragaman Hayati		
20	Lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa dan dikelola di dalam, atau yang berdekatan dengan kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung	1
21	Uraian dampak signifikan kegiatan, produk, dan jasa terhadap keanekaragaman hayati di kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung	1
22	Habitat yang dilindungi atau dipulihkan	1
23	Jumlah total spesies dalam IUCN Red List dan spesies dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dengan habitat di tempat yang dipengaruhi operasional, berdasarkan tingkat risiko kepunahan	1
Aspek : Emisi		
24	Emisi gas rumah kaca (GRK) langsung (cakupan 1)	1
25	Emisi gas rumah kaca (GRK) tidak langsung (cakupan 2)	1
26	Emisi gas rumah kaca (GRK) tidak langsung lainnya (cakupan 3)	1
27	Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)	1
28	Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK)	1
29	Emisi bahan perusak ozon (BPO)	1
30	NOx, SOx, dan emisi udara signifikan lainnya	1
Aspek : Efluen dan Limbah		
31	Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan	1
32	Bobot total limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan	1
33	Jumlah dan volume total tumpahan signifikan	1
34	Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan konvensi Basel Lampiran I, II, III, dan VIII yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah, dan persentase limbah yang diangkut untuk pengiriman internasional	1
35	Identitas, ukuran, status lindung, dan nilai keanekaragaman hayati dari badan air dan habitat terkait yang secara signifikan terkena dampak dari pembuangan air limpasan dari organisasi	1
Aspek : Produk dan Jasa		
36	Tingkat mitigasi dampak terhadap lingkungan produk dan jasa	1
37	Persentase produk yang terjual dan kemasannya yang direklamasi menurut kategori	1
Aspek : Kepatuhan		

38	Nilai moneter denda signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lingkungan	1
Aspek : Transporasi		
39	Dampak lingkungan signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain serta bahan untuk operasional organisasi dan pengangkutan tenaga kerja	1
Aspek : Lain-lain		
40	Total pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan berdasarkan jenis	1
Aspek : Asesmen Pemasok atas Lingkungan		
41	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan	1
42	Dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensial dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil	1
Aspek : Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan		
43	Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi	1
KATEGORI : SOSIAL		
Sub-Kategori : Praktik Ketenagakerjaan dan Kenyamanan Bekerja		
Aspek : Kepegawaian		
44	Jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru dan turnover karyawan menurut kelompok umur, gender, dan wilayah	1
45	Tunjangan yang diberikan bagi karyawan purnawaktu yang tidak diberikan bagi karyawan sementara atau paruh waktu, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan	1
46	Tingkat kembali bekerja dan tingkat retensi setelah cuti melahirkan, menurut gender	1
Aspek : Hubungan Industrial		
47	Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional, termasuk apakah hal tersebut tercantum dalam perjanjian bersama	1
Aspek : Kesehatan dan Keselamatan Kerja		
48	Persentase total tenaga kerja yang diwakili dalam komite bersama formal manajemen-pekerja yang membantu mengawasi dan memberikan saran program kesehatan dan keselamatan kerja	1
49	Jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari hilang, dan kemangkiran, serta jumlah total kematian akibat kerja menurut daerah dan gender	1

50	Pekerja yang sering terkena atau berisiko tinggi terkena penyakit yang terkait dengan pekerjaan mereka	1
51	Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian formal dengan serikat pekerja	1
Aspek : Pelatihan dan Pendidikan		
52	Jam pelatihan rata-rata pertahun per karyawan menurut gender, dan menurut kategori karyawan	1
53	Program untuk manajemen ketrampilan dan pembelajaran seumur hidup yang mendukung keberlanjutan kerja karyawan dan membantu mereka mengelola purna bakti	1
54	Peresentase karyawan yang menerima review kinerja dan pengembangan karier secara regular, menurut gender dan kategori karyawan	1
Aspek : Keberagaman dan Kesetaraan Peluang		
55	Komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan perkategori karyawan menurut gender, kelompok usia keanggotaan kelompok minoritas, dan indikator keberagaman lainnya	1
Aspek : Kesetaraan Remunerasi Perempuan dan Laki-laki		
56	Rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut kategori karyawan, berdasarkan lokasi operasional yang signifikan	1
Aspek : Asesmen Pemasok atas Praktik Ketenagakerjaan		
57	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria praktik ketenagakerjaan	1
58	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap praktik ketenagakerjaan dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil	1
Aspek : Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan		
59	Jumlah pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi	1
Sub-Kategori : Hak Asasi Manusia		
Aspek : Investasi		
60	Jumlah total dan persentase perjanjian dan kontrak investasi yang signifikan yang menyertakan klausul terkait hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan hak asasi manusia	1
61	Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan atau prosedur hak asasi manusia terkait dengan aspek hak asasi manusia yang relevan dengan operasi termasuk persentase karyawan yang dilatih	1

Aspek : Non- Diskriminasi		
62	Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan korektif yang diambil	1
Aspek : Kebebasan Berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama		
63	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi untuk melatih kebebasan dari asosiasi dan collective bargaining dalam risiko yang signifikan dan aksi yang diambil untuk mendukung hal tersebut	1
Aspek : Pekerja Anak		
64	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan eksploitasi pekerja anak dan tindakan yang diambil untuk berkontribusi dalam penghapusan pekerja anak yang efektif	1
Aspek : Pekerja Paksa atau Wajib Kerja		
65	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan pekerja paksa atau wajib kerja dan tindakan untuk berkontribusi dalam penghapusan segala bentuk pekerja paksa atau wajib kerja	1
Aspek : Praktik Pengamanan		
66	Persenentase petugas pengaman yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak asasi manusia di organisasi yang relevan dengan operasi	1
Aspek: Hak Adat		
67	Jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat dan tindakan yang diambil	1
Aspek : Asesmen		
68	Jumlah total dan persentase operasi yang telah melakukan review atau asesmen dampak hak asasi manusia	1
Aspek : Asesmen Pemasok atas Hak Asasi Manusia		
69	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia	1
70	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap hak asasi manusia dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil	1
Aspek : Mekanisme Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia		
71	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan formal	1
Sub-Kategori : Masyarakat		
Aspek : Masyarakat Lokal		
72	Persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, asesmen dampak, dan program pengembangan yang diterapkan	1

73	Operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat	1
Aspek : Anti-Korupsi		
74	Jumlah total dan persentase operasi yang dinilai terhadap risiko terkait dengan korupsi dan risiko signifikan yang teridentifikasi	1
75	Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi	1
76	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil	1
Aspek : Kebijakan Publik		
77	Nilai total kontribusi politik berdasarkan negara dan penerima/penerima manfaat	1
Aspek : Anti-Persaingan		
78	Jumlah total tindakan hukum terkait anti-persaingan, anti-trust, serta praktik monopoli dan hasilnya	1
Aspek : Kepatuhan		
79	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan	1
Aspek : Asesmen Pemasok atas Dampak pada Masyarakat		
80	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria untuk dampak terhadap masyarakat	1
81	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat dalam rantai pasokan dan tindakan	1
Aspek : Mekanisme Pengaduan Dmpak terhadap Masyarakat		
82	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi	1
Sub-Kategori : Tanggung Jawab atas Produk		
Aspek : Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan		
83	Persentase kategori produk dan jasa yang signifikan dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan yang dinilai untuk peningkatan	1
84	Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa sepanjang daur hidup, menurut jenis hasil	1
Aspek : Pelabelan Produk dan Jasa		
85	Jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh prosedur organisasi terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, serta persentase kategori produk dan jasa yang signifikan harus mengikuti persyaratan informasi sejenis	1

86	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa menurut hasil	1
87	Hasil survey untuk mengukur kepuasan pelanggan	1
Aspek : Komunikasi Pemasaran		
88	Penjualan produk yang dilarang atau disengketakan	1
89	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promosi, dan sponsor, menurut jenis hasil	1
Aspek : Privasi Pelanggan		
90	Jumlah total keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran privasi pelanggan dan hilangnya data	1
Aspek : Kepatuhan		
91	Nilai moneter denda yang signifikan atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait penyediaan dan penggunaan produk jasa	1
Skor yang harus diungkapkan oleh perusahaan		91

Sumber: Global Reporting Initiatives (G4).

2.5 Penelitian Terdahulu

Sebagai acuan dari penelitian ini maka peneliti tidak lupa untuk melihat penelitian terdahulu antara lain:

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
FELYNA PRIYANKA (2013)	PENGARUH PENGUNGKAPAN <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)</i> TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN <i>HIGH PROFILE</i> YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2009-2011	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengungkapan <i>corporate sosial responsibility (CSR)</i> tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROE perusahaan <i>high profile</i> yang terdaftar di BEI periode 2009-2011 dengan nilai t hitung 0,148 pada tingkat signifikansi 0,863, (2) pengungkapan <i>corporate sosial responsibility (CSR)</i> tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap

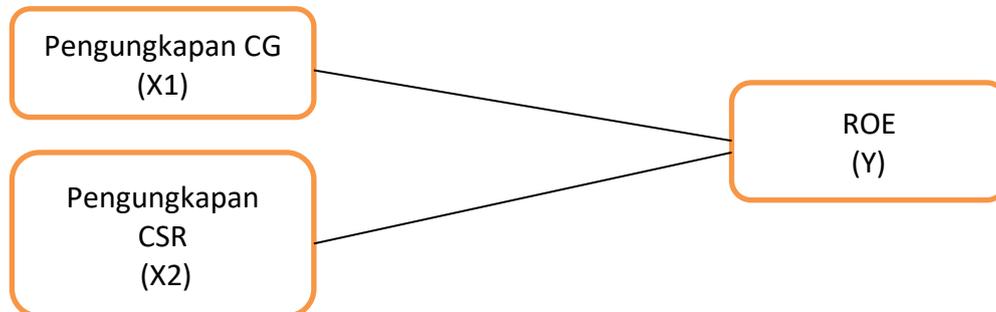
		ROA perusahaan <i>high profile</i> yang terdaftar di BEI periode 2009-2011 dengan nilai t hitung 0,648 pada tingkat signifikansi 0,519, (3) pengungkapan <i>corporate sosial responsibility</i> (CSR) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap EPS perusahaan <i>high profile</i> yang terdaftar di BEI periode 2009-2011 dengan nilai t hitung 44,318 pada tingkat signifikansi 0,000, (4) pengungkapan <i>corporate sosial responsibility</i> (CSR) tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap NPM perusahaan <i>high profile</i> yang terdaftar di BEI periode 2009-2011 dengan nilai t hitung 1,163 pada tingkat signifikansi 0,248.
Diana Istighfarin (2015)	PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PROFITABILITAS PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan CGPI berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan ukuran dewan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.
VEIGA SARTIKA (2017)	ANALISIS FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LUAS PENGUNGKAPAN CORPORATE GOVERNANCE DALAM LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN PERBANKAN INDONESIA (Studi Empiris Perusahaan Perbankan Indonesia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011–2015)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap variabel luas pengungkapan corporate governance. Sedangkan variabel umur listing, Komisaris independen, kepemilikan dispersi dan Profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan corporate governance.

Syahrul Effendi (2018)	PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN INDEKS SRI KEHATI	Hasilnya Corporate Social Responsibility tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan melalui profitabilitas sebagai variabel intervening karena pengaruh langsung Corporate Social Responsibility terhadap nilai perusahaan sebesar 0,255 lebih besar dari pada nilai standardized coefficient beta dari pengaruh tidak langsung CSR terhadap nilai perusahaan melalui profitabilitas sebesar 0,0180.
Primasa Minerva Nagari (2019)	PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP PROFITABILITAS DAN DAMPAKNYA TERHADAP NILAI PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2016-2018	Memiliki kesimpulan bahwa tanggung jawab sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas yang dicerminkan dengan ROA dan ROE serta pengaruhnya juga terhadap nilai perusahaan yang dalam penelitian ini dicerminkan oleh Tobins'Q

2.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris tentang pengungkapan *corporate governance* dan pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap ROE pada perusahaan manufaktur yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018. Variabel-variabel yang diuji dalam penelitian ini adalah pengaruh pengungkapan GCG dan pengungkapan CSR. Berdasarkan landasaan teori yang telah dikemukakan di atas, maka dapat digambarkan kerangka konseptual pada gambar 2.5. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2.5
Kerangka Pemikiran



2.7 Bangunan Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan serta penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.7.1 Hubungan pengungkapan *Corporate Governance* terhadap Profitabilitas Perusahaan

Pengaruh antara corporate governance dan kinerja perusahaan oleh Klapper (2012) yang sejalan dengan hasil penelitian Baurer (2013) dalam pelaksanaan GCG berpengaruh terhadap ROE, Tobins'Q dan NPM. Battcharya (2010) rasio profitabilitas seperti ROA, ROE dan NPM memiliki hubungan positif dengan GCG, ini mengidentifikasikan bahwa semakin baik pengelolaan perusahaan maka semakin baik pengelolaan perusahaan tersebut maka akan semakin baik tingkat pengembalian perusahaan. Hasil berbeda ditunjukkan oleh Sayidah (2007) menemukan bahwa corporate governance tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang diukur menggunakan rasio profit margin, ROA, ROE maupun ROI. Berdasarkan uraian tersebut hipotesis penelitian yang berikutnya adalah:

H1: Pengungkapan Corporate Governance berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan.

2.7.2 Hubungan CSR terhadap Profitabilitas Perusahaan

CSR adalah bagaimana perusahaan secara sukarela memberikan kontribusi bagi terbentuknya masyarakat yang lebih baik dan lingkungan yang lebih bersih. A.B Susanto (2011) mengemukakan bahwa sebuah perusahaan yang

menunjukkan tanggung jawab sosialnya akan memberikan perhatian kepada peningkatan kualitas perusahaan (*profit*) masyarakat, khususnya komunitas sekitar (*people*) serta lingkungan hidup (*planet*). ROE mengukur pengembalian absolut yang akan diberikan perusahaan kepada para pemegang saham. Angka ROE yang tinggi akan membawa keberhasilan bagi perusahaan yang mengakibatkan tingginya harga saham dan membuat perusahaan dapat dengan mudah menarik dana baru (Kurnianto, 2011). Hal ini juga dapat membuat perusahaan menjadi berkembang, menciptakan kondisi pasar yang sesuai dan nantinya akan memberikan laba yang lebih besar dan seterusnya. Semua hal tersebut dapat membuat nilai yang tinggi dan pertumbuhan yang berkelanjutan atas kekayaan pemiliknya (Walsh Ciaran, 2014). Maka dengan pengungkapan *CSR* ini banyak menarik investor untuk menanam modalnya diperusahaan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut hipotesis penelitian yang berikutnya adalah:

H2: *Corporate Social Responsibility (CSR)* berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan.